

Nama : Roy Steven Alexander

NIM : 2407020129

Fakultas : Ekonomika dan Bisnis

Prodi : Akuntansi

Analisis sederhana dalam proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia

A. 3 Peristiwa Historis dalam proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia

Perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah proses yang penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah tiga peristiwa utama dalam proses tersebut:

1. Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Pertama - 29 Mei hingga 1 Juni 1945

BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara. Dalam sidang ini, beberapa tokoh mengusulkan pandangan mereka terkait dasar negara:

- 29 Mei 1945: Muhammad Yamin menyampaikan pidato berjudul "Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia" yang terdiri dari lima asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yamin juga mengusulkan secara tertulis rancangan UUD yang memuat Pancasila dalam bentuk tertulis.
- 31 Mei 1945: Prof. Dr. Soepomo, seorang ahli hukum, menyampaikan pandangannya yang menekankan prinsip integralistik, dengan fokus pada persatuan dan menghindari individualisme.
- 1 Juni 1945: Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang sangat terkenal yang memperkenalkan konsep Pancasila (lima prinsip) yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia, yaitu: kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila yang diajukan oleh Soekarno ini akhirnya menjadi landasan ideologis yang kuat dan diterima sebagai konsep dasar negara Indonesia.

Sumber : <https://jdih.bpip.go.id/common/dokumen/arsiplangka-sidangbpupkisumberanri.pdf>

2. Sidang Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta - 22 Juni 1945

Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia Sembilan, yang bertugas merumuskan lebih lanjut dasar negara Indonesia. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh penting, termasuk Soekarno, Mohammad Hatta, dan tokoh-tokoh lain dari berbagai golongan.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah dokumen yang disebut Piagam Jakarta, yang memuat Pancasila dengan beberapa modifikasi, salah satunya penambahan kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di sila pertama. Piagam Jakarta ini menjadi kesepakatan antara tokoh-tokoh dari golongan Islam dan nasionalis.

Piagam Jakarta sempat menjadi dasar rancangan Undang-Undang Dasar, tetapi kemudian beberapa kalimatnya mengalami perubahan sebelum disahkan secara resmi.

Sumber: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5733758/ini-hasil-sidang-panitia-semilan-tanggal-22-juni-1945-dan-sejarahnya>

3. Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan Pengesahan Pancasila - 18 Agustus 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya, 18 Agustus 1945, diadakan sidang PPKI yang bertujuan untuk mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar.

Dalam sidang ini, terdapat perdebatan mengenai sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Setelah mempertimbangkan keberagaman bangsa Indonesia, khususnya penduduk yang bukan beragama Islam, maka diambil keputusan untuk mengubah sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Pancasila menjadi lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang disahkan pada sidang ini akhirnya terdiri dari lima sila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila ini kemudian dimasukkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Sumber: <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jpkbpkpp-p-3207>

Ketiga peristiwa tersebut adalah tonggak-tonggak sejarah penting dalam perjalanan perumusan dan pengesahan Pancasila, yang hingga kini menjadi dasar ideologi negara Indonesia.

B. Nilai Pengamalan Pancasila dari 3 peristiwa tersebut

Pengamalan Pancasila dapat kita pelajari dari proses sejarah perumusan dan pengesahannya yang melibatkan perdebatan, kompromi, serta semangat persatuan dan keadilan. Setiap langkah dalam peristiwa tersebut mengandung nilai-nilai Pancasila yang terus relevan hingga saat ini. Berikut ini adalah narasi pengamalan Pancasila berdasarkan peristiwa tersebut :

Pengamalan Pancasila dalam Peristiwa Sejarah Perumusan dan Pengesahan Dasar Negara Indonesia

Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menggambarkan bagaimana para pendiri bangsa merumuskan konsep filosofis untuk Indonesia, tetapi juga mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam prosesnya.

Dalam Sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, mengamalkan sila keempat *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*. Mereka mengajukan berbagai pandangan dan usulan terkait dasar negara melalui proses musyawarah yang terbuka dan penuh hikmat. Tiap gagasan, mulai dari nasionalisme hingga integralistik, dipertimbangkan dengan

saksama. Usulan Soekarno mengenai konsep Pancasila pada 1 Juni 1945, yang dihasilkan dari proses dialog demokratis ini, menjadi cerminan bahwa bangsa Indonesia menghargai perbedaan pandangan dalam mencari kesepakatan demi kebaikan bersama.

Pengamalan sila ketiga *Persatuan Indonesia* sangat jelas terlihat dalam peristiwa penyusunan Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Di tengah keberagaman pandangan, khususnya antara golongan Islam dan nasionalis, para pendiri bangsa tetap mengutamakan persatuan di atas segala perbedaan. Mereka berhasil menyusun sebuah dokumen yang menjadi kompromi antara berbagai kepentingan. Meskipun terdapat usulan untuk memasukkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam sila pertama, semangat persatuan tetap dijunjung tinggi dengan mempertimbangkan keberagaman keyakinan di Indonesia. Nilai ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan dalam menjaga keharmonisan bangsa yang majemuk.

Kemudian, pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kita menyaksikan pengamalan sila kedua *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Ketika perdebatan mengenai sila pertama dalam Piagam Jakarta muncul, para pemimpin bangsa tidak hanya berpikir untuk kepentingan satu kelompok, tetapi juga memikirkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak beragama Islam. Dengan mengubah sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa," mereka menunjukkan penghormatan terhadap kemanusiaan dan keberagaman keyakinan. Keputusan ini mengandung makna bahwa dasar negara Indonesia harus dapat melindungi dan menghormati seluruh rakyat, tanpa membedakan suku, agama, atau keyakinan.

Selain itu, dalam proses pengesahan Pancasila, pengamalan sila kelima *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* juga tampak jelas. Para pendiri bangsa memahami bahwa negara yang akan dibentuk bukan hanya untuk golongan tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang. Keadilan sosial menjadi landasan dalam merumuskan setiap keputusan penting, termasuk dalam pembentukan undang-undang dan dasar negara. Harapan akan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat menjadi semangat yang mendorong perjuangan mereka.

Melalui perumusan Pancasila, kita juga melihat pengamalan sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa*, di mana dasar negara akhirnya dirumuskan dengan menghormati nilai-nilai ketuhanan yang inklusif. Ini menggambarkan bahwa sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia berkomitmen untuk membangun negara yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral, tanpa memaksakan keyakinan agama tertentu.

Dengan demikian, setiap peristiwa dalam sejarah perumusan Pancasila menggambarkan bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila telah dihayati dan dipraktikkan

oleh para pendiri bangsa. Proses musyawarah, penghargaan terhadap kemanusiaan, dan semangat persatuan menjadi contoh pengamalan nyata yang terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini.